

**KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN
KEMAMPUAN PERANGKAT DESA PENCAPAIAN TERTIB
ADMINISTRASI DI DESA BANGUN PURBA KECAMATAN
BANGUN PURBA KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

OLEH

**AKA ROBERTH DANIEL PURBA
10.851.0031**



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2014

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)8/8/23

**KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN
KEMAMPUAN PERANGKAT DESA PENCAPAIAN TERTIB
ADMINISTRASI DI DESA BANGUN PURBA KECAMATAN
BANGUN PURBA KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

OLEH :

AKA ROBERTH DANIEL PURBA

10.851.0031

**Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

M E D A N

2 0 1 4

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (Repository.uma.ac.id)8/8/23

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kemampuan Perangkat Desa Pencapaian Tertib Administrasi Di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang


Nama : Aka Roberth Daniel Purba

NPM : 10.851.0031

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Drs. Maksun Syahri Lubis, STP., M.AP.
Pembimbing I


Dra. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si.
Pembimbing II

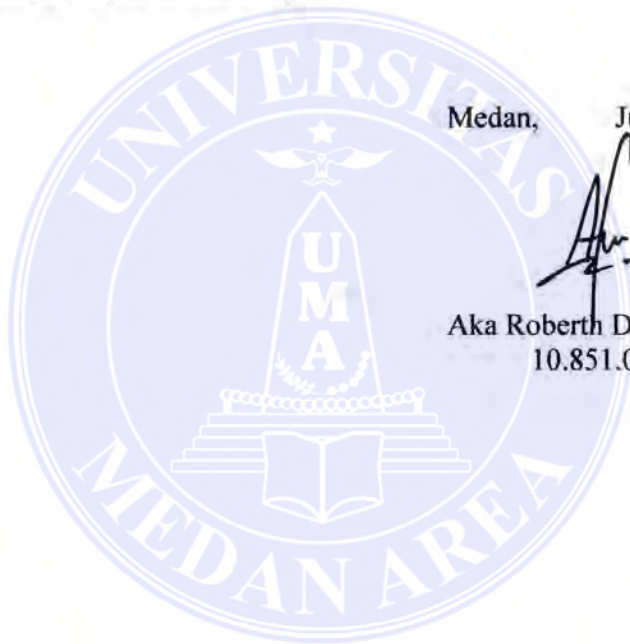


Dt. Abdul Kadir, M.Si.
Dekan

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian – bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi – sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan,

Juni 2014

Aka Robert Daniel Purba
10.851.0031

RIWAYAT HIDUP

Aka Roberth Daniel Purba lahir di Sei Buaya pada tanggal 04 Februari 1972. Ayahanda bernama Samuel Purba dan Ibunda Elisabeth Tarigan, Penulis merupakan anak Pertama dari Enam bersaudara. Pada tahun 1977 penulis diterima bersekolah di SD Khalsa, Medan dan lulus pada tahun 1984 .Pada tahun yang sama penulis diterima menjadi salah satu siswa di SMP Islamic Village, Tangerang dan lulus 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1987. Penulis langsung melanjutkan pendidikannya ke SMA Raksana, Medan dan lulus pada tahun 1990. Penulis menikah dengan Masayu Dessy Arvianti,SE dan telah dikarunia Dua orang putra bernama Fachri Al-Rassyid Purba dan Dennis Hilmy Aqila Purba, Penulis diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil dan sampai sekarang bertugas di Kantor Camat Bangun Purba. Pada Tahun 2010 penulis melanjutkan jenjang Pendidikan Strata I nya di Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Medan Area.



ABSTRAK

Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kemampuan Perangkat Desa Pencapaian Tertib Administrasi Di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang

Oleh :

Aka Roberth Daniel Purba

10.851.0031

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan Perangkat Desa Bangun Purba dalam Pencapaian Tertib Administrasi melalui Kepemimpinan Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.

Populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur Desa dan sampelnya adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana alat pengumpul data berupa hasil dan observasi, wawancara, studi literature/pustaka.

Hasil analisis data yang diperoleh adalah untuk meningkatkan kemampuan Perangkat Desa dengan jalan mengikut sertakan dalam kursus – kursus, penataran – penataran serta memberikan motivasi terhadap perangkatnya, menjalankan fungsi koordinasinya terhadap semua pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

Selalu mengadakan kunjungan, tatap muka dengan Pemuka Masyarakat, mengadakan pertemuan – pertemuan dengan Pemuka – Pemuka Masyarakat yang ada di wilayah kerjanya, memotivasi, kesadaran dan disiplin Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas yang diperoleh dengan baik.

Kata kunci : Kepala Desa, Perangkat Desa, Kapabilitas, Populasi

ABSTRACT

THE LEADERSHIP OF KEPALA DESA TO INCREASE PERANGKAT DESA ABILITY FOR ADMINISTRATION ORDER ATTAINMENT in BANGUN PURBA KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN DELI SERDANG

Oleh :

Aka Roberth Daniel Purba
10.851.0031
Government Science Course

The study aims to determine the increased capability of the village of Bangun Purba in achieving orderly administration through leadership of the Head Man Kecamatan Bangun Purba in Deli Serdang regency.

The population in this study is a village, apparaturs and the sample is Head Man in the Bangun Purba village Kecamatan Bangun Purba in Deli Serdang regency. This study is a qualitative study in which data collector tool in the form of results of observations, interviews, literature study / library.

Result analysis of the data obtained is “ to improve the ability of the village to the road to involve in course, upgrading and providing motivation to the device, perform the fungtion of coordinating the implementation of all development in the area.

Always visits, face to face with community leaders, held meetings with the community leaders in the working area, motivation, awareness and discipline in carrying out the duties of the village well earned.

Key Words : Headman, Villages Apparaturs, Capability, Population

KATA PENGANTAR

Pada kesempatan yang pertama ini penulis mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmad-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah **"Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kemampuan Perangkat Desa Pencapaian Tertib Administrasi Di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang"**.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Dr. Abdul Kadir, M.Si, Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area .
- Bapak Rudi Salam Sinaga, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.
- Bapak Maksum Syahri Lubis, STP., MAP, selaku Dosen Pembimbing I

Penulis
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)8/8/23

- Ibu Dra. Effiati Juliana Hasibuan., M.Si, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak Kepala Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang beserta staf dimana penulis melakukan penelitian.
- Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam dalamnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda bagi keduanya bakti dan doa penulis.

Demikianlah dahulu penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juni 2014

Penulis

Aka Robert Daniel Purba
10.851.0031

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.3. Pembatasan Masalah	3
1.4. Perumusan Masalah	4
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1. Uraian Teori	6
2.1.1. Pengertian Pemimpin dan Kepemimpinan	6
2.1.2. Tipe-Tipe Kepemimpinan	8
2.1.3. Syarat-syarat Kepemimpinan	11
2.1.4. Pengertian Pemerintahan Desa	13
2.2. Kerangka Pemikiran	15
2.3. Hipotesis	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	18
3.2 Populasi dan Sampel	18
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	19
3.4 Defenisi Operasional Variabel	19
3.5 Analisis Data	20

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

iii

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)8/8/23

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	22
4.1. Hasil Penelitian	22
4.1.1. Keadaan Umum	22
4.1.2. Keadaan Khusus	27
4.1.3. Struktur Organisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang dan Uraian Tugas	29
4.2. Pembahasan	34
4.2.1. Kepemimpinan Kepala Desa Bangun Purba Dalam meningkatkan Kemampuan Perangkat Desa Untuk tercapainya Tertib Administrasi Desa.....	34
4.2.2. Kemampuan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintah Di Desa Bangun Purba	35
4.2.3. Upaya Peningkatan Kemampuan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Di Desa Bangun Purba	39
4.2.4. Faktor – Faktor Penghambat dan Pendukung	42
4.2.5. Analisis Struktur Organisasi	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	49
5.1. Kesimpulan	49
5.2. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Tanah Di Desa Bangun Purba Tahun 2013	22
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Di Desa Bangun Purba Tahun 2013	23
Tabel 4.3 Pengelompokan Penduduk Menurut Mata Pencaharian Di Desa Bangun Purba Tahun 2013	24
Tabel 4.4 Suku-suku yang Terdapat Di desa Bangun Purba 2013	25
Tabel 4.5 Penduduk Dirinci Berdasarkan kepercayaan yang di anut masyarakat Di Desa Bangun Purba Tahun 2013	26
Tabel 4.6 Jumlah Prasarana keagamaan Di Desa Bangun Purba Tahun 2013.....	26
Tabel 4.7 Jumlah Prasarana Pendidikan Di Desa Bangun Purba Tahun 2013.....	27
Tabel 4.8 Jumlah Prasarana Kesehatan Di Desa Bangun Purba Tahun 2013.....	27
Tabel 4.9 Jumlah Tenaga Medis Di Desa Bangun Purba Tahun 2013	28

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4	Skema Organisasi Pemerintahan Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang 29



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berhasilnya pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta pada sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara serta seluruh rakyat Indonesia.

Jadi dengan demikian keberhasilan pembangunan terletak pada seluruh aparatur negara dan peran aktif seluruh rakyat. Desa yang menjadi wilayah pemerintahan terendah langsung di bawah Camat sebagai titik tumbuh dari pembangunan nasional. Dalam masa pembangunan saat ini desa mempunyai peranan penting, yaitu sebagai obyek dan subyek pembangunan di segala bidang dalam usaha mencapai tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram dan dinamis serta dalam pergaulan dunia yang merdeka bersahabat, tertib dan damai.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah desa yang dalam penyelenggaraannya harus dilaksanakan sebaik mungkin dengan ditunjang pelaksanaan administrasi di desa yang tertib, dengan demikian diperlukan adanya peran aktif Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berdaya guna dan berhasil guna, maka pelaksanaan administrasi desa perlu dilaksanakan dengan tertib dan lebih baik. Mengingat desa sebagai sumber informasi, baik berupa data maupun keterangan-keterangan. Data yang ada di desa merupakan produk administrasi desa, harus mempunyai nilai kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan karena data tersebut sering kali dipergunakan untuk rencana pembangunan oleh Pemerintah Daerah atau instansi lainnya.

Dalam pada itu yang dimaksud dengan penyelenggaraan administrasi desa adalah penyelenggaraan semua kegiatan yang bersumber pada wewenang Pemerintah Desa yang terdiri atas fungsi, tugas, kewajiban, tanggung jawab dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

hubungan kerja yang berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini semua hanya dapat dilaksanakan apabila Kepala Desa dan perangkatnya mempunyai kemampuan disiplin dan kesadaran akan pentingnya tertib administrasi desa.

Maka sewajarnya pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap peningkatan kemampuan perangkat desa dengan jalan pendidikan khusus, kursus-kursus, penataran-penataran mengenai administrasi desa. Kurangnya perhatian terhadap masalah administrasi desa akan menghamambat terhadap pelaksanaan pembangunan. Dan terhambatnya usaha-usaha pembangunan akan mengurangi partisipasi masyarakat terhadap pemerintah di segala bidang.

Pada dasarnya pembangunan adalah suatu perubahan sosial dalam proses ini, perubahan tidak hanya diharapkan terjadi pada taraf kehidupan masyarakat, tetapi juga peranan unsur-unsur yang terkait di dalam proses pembangunan yaitu negara dalam hal ini pemerintah dan masyarakat. Maka dalam waktu yang relatif singkat

Bagi negara Republik Indonesia, sikap yang ditempuh oleh Pemerintah, dimana peranan Pemerintah didalam segenap aspek kehidupan masyarakat sangat menonjol. Namun demikian tidaklah dimaksudkan bahwa segala sesuatunya akan diurus oleh Pemerintah. Peranan itu terutama ditujukan kepada pelaksanaan rangkaian usaha dalam mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan sekaligus menggerakkan segenap potensi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pemerintahan pembangunan.

Karena tugas kepala desa sebagai seorang kepala wilayah dan sebagai administrator juga sebagai koordinator pembangunan kepada wilayahnya dituntut harus mampu untuk membangkitkan dan mengarahkan partisipasi seperti partisipasi gotong royong dari masyarakat.

Sehingga akan timbul kesadaran bagi masyarakat untuk membangun daerahnya atau desanya sebagai suatu usaha meletakkan landasan dasar yang kuat terhadap pembangunan nasional. Untuk hal yang demikian dapat dikemukakan bahwa peranan tugas kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui suatu dukungan, pembinaan-pembinaan dalam segi administratif maupun

yang sifatnya operasional, mengkoordinasikan semua aktivitas-aktivitas mulai dari perencanaan sampai kepada pelaksanaannya. Dengan demikian peranan kepala desa disini tidak terlepas daripada peranan kepemimpinan di wilayahnya yakni membimbing atau memberikan pengarahannya pada orang-orang lain dalam mencapai tujuan yang diinginkan sebelumnya.

Dalam rangka membangkitkan serta meningkatkan partisipasi dari masyarakat di wilayahnya, memerlukan suatu cara dan pendekatan tersendiri bagi seorang Kepala desa sebagai administrator dan koordinator pembangunan.

Bertitik tolak dari keseluruhan uraian di atas maka penulis memilih judul untuk penulisan skripsi ini, yakni: **“Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kemampuan Perangkat Desa Pencapaian Tertib Administrasi Di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Belum tercukupinya kemampuan dan intelektual sumber daya manusia Kantor Desa Bangun Purba di bidang administrasi desa.
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam hal peningkatan kemampuan perangkat desa dalam pencapaian tertib administrasi desa.
3. Kepemimpinan kepala desa belum menunjukkan teladan yang baik dalam hal peningkatan tertib administrasi desa.

1.3. Pembatasan Masalah

Masalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Suhardi (2003:1), adalah: “Suatu persoalan atau problem yang sukar diselesaikan dan terdiri dari suatu soal-soal yang telah diketahui sebagian sedang yang sebagian lagi belum diketahui atau belum diketahui sepenuhnya, kelompok soal-soal mana yang menuntut supaya cepat diselesaikan”.

Jadi masalah tersebut merupakan suatu yang harus dipecahkan apabila menginginkan suatu yang diharapkan atau ingin dicapai agar dapat terwujud. Hal lain dapat disimpulkan bahwa masalah itu merupakan suatu kumpulan persoalan-

persoalan hidup bagi manusia yang pemecahannya selalu memerlukan bantuan orang lain yang mempunyai pengalaman lebih banyak dari orang yang mempunyai masalah, sehingga pemecahannya dapat ditemukan.

Berdasarkan latar belakang masalah dan juga perumusan yang telah diuraikan terdahulu maka perlu pula dilakukan pembatasan atas masalah yang diajukan agar tidak timbul penafsiran yang berbeda tentang batasan dari rumusan masalah yang diajukan. Adapun pembatasan masalah tersebut adalah Ruang lingkup penelitian pada Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.

1.4. Perumusan Masalah

Menurut Hatta (2000:14):

“ Masalah adalah kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati tentang kedudukannya, kita tidak puas hanya dengan melihat saja, melainkan kita ingin mengetahui lebih dalam”.

Berdasarkan pendapat di atas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut “Bagaimana sebenarnya fungsi kepala desa dalam melakukan tugasnya sebagai seorang pimpinan dalam meningkatkan tertib administrasi di wilayahnya?”

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui bagaimana sebenarnya fungsi kepemimpinan kepala desa dalam melaksanakan tertib administrasi di di wilayah yang dipimpinnya tersebut khususnya dalam menciptakan tertib administrasi.
2. Mengetahui bagaimana fungsi perangkat Desa seperti Sekretaris Desa, KAUR Umum, KAUR Pemerintah, dan KAUR Pembangunan.
3. Mencoba mencari kepastian dan kebenaran masalah tersebut diatas dan sekaligus mencari jalan untuk pemecahannya berdasarkan pengetahuan ilmiah, sehingga dapat diterapkan secara sederhana mungkin.

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah :

1. Sumbangan pemikiran kepada pemerintahan, khususnya Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat desa untuk tercapainya tertib administrasi di wilayah tersebut.
2. Guna memenuhi salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana S-1 dalam bidang Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Medan Area.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Pengertian Pemimpin dan Kepemimpinan

Pada umumnya kepemimpinan adalah merupakan suatu kegiatan atau usaha yang menyebabkan orang lain untuk bertindak atas perintahnya atau atas apa yang dikehendakinya. Dimana usaha-usaha tersebut bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu yang telah ditetapkan, dengan jalan memanfaatkan segala sumber yang telah tersedia dengan menggunakan jalan yang terbaik.

Pada hakekatnya di dalam suatu perkumpulan atau suatu ikatan yang resmi ataupun yang tidak resmi harus memerlukan kepemimpinan yang luas, berbakat dan bertanggung jawab berkepribadian, bijaksana dan lain-lain.

Buktinya dapat dilihat dari kenyataan-kenyataan fungsi dan peranan penting dari pimpinan di dalam menjalankan operasi suatu perusahaan. Kepemimpinan merupakan inti motor penggerak dari fungsi manajemen. Di samping itu kepemimpinan berhubungan erat dengan unsur konkrit sosial karena kepemimpinan itu adalah kunci daripada manajemen.

Di dalam membicarakan kepemimpinan, pertama-tama akan dibahas pengertian perkataan pemimpin dan kepemimpinan.

Menurut Kartini (2003:33): "Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang - orang untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan ".

Menurut Tulus (2005:3) : " Istilah kepemimpinan sebagai terjemahan dari Leader ship " sering kali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat dari percakapan, dari ceramah, atau kita baca dalam surat kabar, majalah, buku dan sebagainya.

Dalam pengertian umum, kepemimpinan menunjukkan prose kegiatan seseorang dalam memimpin, membimbing, mempengaruhi atau mengontrol pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain. Kegiatan tersebut dilakukan



melalui suatu karya atau melalui kontrak pribadi.

Menurut pendapat Sinungan (2001:22) "Kepemimpinan itu merupakan kemampuan untuk memancarkan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan".

Dengan demikian untuk seorang pemimpin, supaya dapat dicapai dengan apa yang diinginkan, walaupun si pemimpin telah menggerakkan bawahan tetapi pada kenyataannya ia belum lagi memiliki leadership oleh karena ia tidak sanggup atau berhasil mempengaruhi para pelaksana kearah yang diinginkan.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut bahwa seorang pemimpin adalah pribadi yang dimiliki kelebihan khusus dan tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok-kelompok yang dipimpinnya, untuk melaksanakan usaha bersama mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran tertentu.

Oleh karena itu untuk dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas ini tidak mudah, umumnya mempengaruhi orang-orang dalam melaksanakan usaha bersama tersebut, karena ada kemungkinan di dalam praktek sebagai pelaksana daripada aktivitas tadi yang dikerjakan adalah sebaliknya.

Misalnya seorang kepala bagian meminta supaya tugas-tugas dipercepat menyelesaikan suatu tugas, akan tetapi hasil yang diperoleh malah sebaliknya.

Dari pertanyaan ini dikemukakan dua materi yang utama yang saling berhubungan satu sama lainnya yaitu adanya usaha mempengaruhi orang lain dan tujuan-tujuan kelompok yang akan dicapai.

Bahwa kepemimpinan diartikan sebagai usaha yang disengaja oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mereka bersedia melakukan suatu tindakan tertentu.

Dikatakan oleh Komaruddin (2008:34) "Kepemimpinan itu merupakan kegiatan untuk mempengaruhi orang, agar orang itu berusaha mencapai tujuan atau sasaran tertentu".

Dari beberapa pengertian di atas, dapatlah dilihat bahwa kepada kepemimpinan itu terdapat unsur-unsur :

- Kepemimpinan mempengaruhi orang lain atau bawahan,
- Kemampuan menggerakkan tingkah laku bawahan,

- Untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok.

Untuk seorang leader yang baik, ia harus dapat menggiatkan para pekerja atau pelaksana kepada semua hal-hal yang dia inginkan. Jadi seorang leader itu haruslah mempunyai suatu kemampuan dalam menggerakkan bawahan atau para pelaksana itu supaya mau melaksanakan tugas-tugas mereka. Di samping itu seorang leader harus mempengaruhi para pelaksana, hal ini disebabkan agar pelaksana mau pekerja secara sukarela dan sadar di dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Untuk dapat menciptakan suatu kesadaran, si leader tidak boleh melakukan kekerasan. Jadi kegiatan seorang leader tidak semudah yang dilihat, akan tetapi meminta suatu kecakapan tertentu di dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Mereka yang memiliki leadership ini disebut dengan pimpinan.

2.1.2. Tipe-Tipe Kepemimpinan

Kartini (2003:31) mengatakan bahwa tipe kepemimpinan tersebut adalah :

- a. Tipe Kharismatis
- b. Tipe Parternalitis
- c. Tipe Militeristis
- d. Tipe Otokratis
- e. Tipe Laisser Faire
- f. Tipe Populistis
- g. Tipe Administratif
- h. Tipe Demokratis.

ad. a. Tipe Kharismatis

Jenis tipe ini adalah tipe kepemimpinan yang dianggap memiliki kekuatan gaib, yang pada umumnya mempunyai pengikut yang jumlahnya sangat besar, karena ia mempunyai daya tarik yang luar biasa. Walaupun tipe ini dalam memimpin bawahannya mendapat kedudukan sebagai pemimpin, ia tidak menggunakan kekayaan, kesehatan, dan lain sebagainya sebagai kharisma dirinya, tetapi ia sanggup memancarkan pengaruh dan daya tarik yang dashyat dari kepribadian pemimpin sebab itu sampai sekarang belum diketahui sebab musabab

kemampuan dari pada kharisma tipe kepemimpinan itu.

ad. b. Tipe Paternalistis

Sifat kebapakan sangat menonjol dalam tipe kepemimpinan paternalistis ini, karena ia selalu menganggap bawahannya sebagai manusia yang belum dewasa, bersikap terlalu melindungi bawahannya (*over protection*), jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berinisiatif dan mengambil keputusan sendiri, serta jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan fantasi dan daya kreativitasnya, selalu bersikap maha tahu, dengan demikian akan menghambat kemajuan para bawahan akibat terlalu ketergantungan kepada bapaknya.

ad. c. Tipe Militeristis

Tipe militeristis bukanlah merupakan seorang pemimpin yang bijaksana atau ideal bagi bawahan, karena tipe ini mempunyai sifat-sifat :

- Sistem perintah/komando yang dipergunakan terhadap bawahan,
- Menginginkan kepatuhan mutlak dari bawahan,
- Menggemari formalitas dan upacara ritual yang berlebihan,
- Sukar menerima saran-saran dan kritikan dari bawahan,
- Menghendaki adanya kerja keras,
- Komunikasi hanya berjalan atau bersifat satu arah saja.

ad. d. Tipe Otokratis

Tipe otokratis ini adalah tipe penguasa absolut dimana sangat bertentangan dengan pemimpin yang dibutuhkan oleh perusahaan modern masa kini, karena hak azasi manusia yang menjadi bawahan itu harus dijunjung dan dihormati.

Kepemimpinan ini didasarkan atas kekuasaan, jadi seorang pemimpin yang otokratis menganggap bahwa kekuasaannya adalah miliknya sehingga mempunyai hak memerintah dan menindak orang lain.

ad. e. Tipe Laisser Faire

Pada tipe kepemimpinan Laisser Faire ini, pemimpin tidak berpartisipasi dalam kegiatan kelompoknya dan membiarkan bawahan berbuat semau sendiri.

Secara praktis pemimpin ini tidak memimpin, dia hanya merupakan pemimpin simbol yang tidak memiliki keterampilan teknis. Kedudukan diperoleh dengan jalan suapan penyogokan atau berkat adanya sistem nepotisme.

Perubahan yang dipimpin semacam ini akan menjadi berantakan, karena tipe ini tidak mampu mengontrol anak buahnya yang tidak melaksanakan koordinasi kerja dengan baik, dan tidak mempunyai kewibawaan, sehingga akan menciptakan suasana kerja yang kacau balau karena tanpa tidak mempunyai disiplin.

ad. f. Tipe Populistic

Kepemimpinan tipe populistic ini ialah kepemimpinan yang mampu mengembangkan solidaritas rakyat. Kepemimpinan populistic ini berpegang teguh pada nilai masyarakat yang tradisional, kurang mempercayai bantuan-bantuan serta dukungan-dukungan kekuatan asing, dimana lebih mengutamakan nasionalisme.

ad. g. Tipe Administratif

Tipe kepemimpinan administratif ini adalah tipe kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan administrasi yang efektif. Pemimpinnya terdiri dari pribadi yang mampu menggerakkan dinamika modernisasi dan pembangunan, sehingga dapat dibangun sistem administrasi yang efisien untuk mendapatkan integritas bangsa pada khususnya dan usaha-usaha pembangunan pada umumnya.

Jadi pada tipe administratif ini diharapkan adanya perkembangan teknis yaitu teknologi, industri dan manajemen modern, perkembangan sosial di tengah masyarakat.

ad. h. Tipe Demokratis

Tipe kepemimpinan ini didasarkan atas kepentingan kelompok dan berusaha untuk memenuhinya. Setiap dalam suatu perusahaan diatur oleh seorang

pemimpin yang bijaksana yang bertindak sebagai pengatur, partisipasi dari golongan atau kelompok sangat diutamakan, sehingga setiap perintah dari atasan dapat dijalankan dengan baik oleh bawahan. Dengan adanya kerja sama ini akan tercipta dengan mudah hubungan yang harmonis antara atasan dengan bawahan sehingga tujuan perusahaan akan tercapai dengan mudah.

2.1.3. Syarat-syarat Kepemimpinan

Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik tidak semudah apa yang diduga. Seorang pemimpin harus dapat bekerjasama dengan bawahannya demi terciptanya tujuan perusahaan. Untuk itu dia harus dapat mengadakan approach dengan baik.

Kepemimpinan biasanya mempunyai sifat kematangan dalam segi mental dan emosi, sebab diantara ahli-ahli psikologi telah terdapat keseragaman pendapat bahwa pemimpin-pemimpin mempunyai kecerdasan yang sedikit lebih tinggi daripada tingkat kecerdasan rata-rata pada bawahannya. Ini juga berarti bahwa pimpinan mempunyai pandangan yang lebih jauh kedepan dengan penganalisaan yang lebih mendalam.

Kartini (2003:32) mengatakan bahwa konsepsi mengenai kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan tiga hal penting :

- a. Kekuasaan ialah kekuatan, otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pimpinan untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu,
- b. Kewibawaan adalah kelebihan, keunggulan, keutamaan sehingga orang mampu mengatur orang lain agar orang tersebut patuh pada pimpinan, dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.
- c. Kemampuan ialah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan keterampilan teknis maupun sosial, yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa.

Menurut pandangan staff management dari American Management Association (AMA) (2004:67) ada beberapa syarat untuk kepemimpinan dengan garis besarnya adalah sebagai berikut :

- a. Mampu untuk menimbulkan kepercayaan pada diri orang lain,

- b. Tabah dalam usahanya untuk mencapai tujuan,
- d. Kemampuan untuk memberikan pengertian tanpa menimbulkan salah paham,
- d. Kesiediaan untuk mendengarkan secara simpatik,
- e. Memahami manusia serta reaksi-reaksinya,
- f. Objektif,
- g. Terus terang

Sebagai perbandingan di dalam membicarakan syarat-syarat kepemimpinan oleh penulis mengambil beberapa pendapat dari para sarjana antara lain :

Nitisemito (2009:104) mengatakan bahwa syarat-syarat kepemimpinan adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan umum yang meluas,
- b. Kemampuan berkembang secara mental,
- c. Ingin tahu
- d. Kemampuan analitis,
- e. Memiliki daya ingat yang kuat,
- f. Kapasitas interaktif,
- g. Keterampilan komunikasi,
- h. Keterampilan mendidik,
- i. Rasionalitas dan objektivitas,
- j. Pragmatis, yaitu membuat keputusan yang dapat dilaksanakan oleh aparat pelaksana sesuai dengan kemampuan dan sumber-sumber yang tersedia dan yang menurut perhitungan akan tersedia,
- k. Adanya naluri untuk prioritas, hasilnya akan mendapat perhatian dan penyelesaian terlebih dahulu,
- l. Sense of urgency, yaitu merasakan adanya keperluan yang mendesak,
- m. Sense of timing, yaitu mengetahui secara tepat tentang saat yang tepat atau tidak tepat untuk bertindak penting untuk dimiliki,
- n. Sense of cohesiveness, yaitu merasa satu dengan pemimpin,
- o. Kesederhanaan,

- p. Keberanian,
- q. Kemauan mendengar,
- r. Adaptabilitas dan fleksibilitas,
- s. Ketegasan.

Sudah jelas dan pasti bahwa tidak ada seorangpun yang dengan serta merta memiliki semua persyaratan tersebut di atas, karena itu dapat dikatakan bahwa hanya bakat-bakat kepemimpinan yang dikembangkan secara terus-menerus akan semakin banyak persyaratan itu dapat dipenuhi meskipun mungkin sepanjang karier seseorang tidak akan pernah memenuhi semua persyaratan tersebut.

Sedang menurut Djaya dalam Nitisemito (2009:106) memberikan pendapat tentang syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Mempunyai kemampuan manajemen
- b. Dapat mendidik dan memimpin,
- c. Cerdas dalam berpikir, dapat bertindak segera dan bijaksana dalam menghadapi soal-soal yang dianggap penting,
- d. Mempunyai rasa simpati terhadap orang lain, dapat mengerti akan persoalan-persoalan, baik yang menyangkut individu maupun organisasi,
- e. Ramah dan toleran sesama, dapat membangkitkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya dan harus jujur,
- f. Adil, berani dan bijaksana dalam mempertahankan pendapatnya terhadap orang yang mencelanya tanpa alasan yang bertanggung-jawab,
- g. Mempunyai sifat-sifat baik dan bermoral tinggi.

Yang jelas, pemimpin itu harus memiliki kelebihan dibandingkan dengan anggota-anggota biasa lainnya, sebab dengan kelebihan-kelebihan tersebut dia bisa berwibawa dan dipatuhi oleh bawahannya.

2.1.4. Pengertian Pemerintahan Desa

Desa, atau udik, menurut definisi "universal", adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit

pemukiman kecil yang disebut kampung (Banten, Jawa Barat) atau dusun (Yogyakarta) atau banjar (Bali) atau jorong (Sumatera Barat). Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain misalnya Kepala Kampung atau Petinggi di Kalimantan Timur, Klèbun di Madura, Pambakal di Kalimantan Selatan, Hukum Tua di Sulawesi Utara.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari, di Aceh dengan istilah gampong, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.

Dari uraian di atas dapat diambil suatu rumusan bahwa unsur-unsur terbentuknya Desa adalah :

1. Adanya suatu wilayah
2. Adanya sejumlah penduduk
3. Adanya pemerintahan.

Dari hal tersebut di atas penulis dapat menggambarkan bahwa kepala Desa adalah aparat pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan Desa, yang mempunyai tanggung-jawab di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Pemerintahan umum dan juga bertanggung-jawab terhadap pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta menyelenggarakan koordinasi fungsional di tingkat pemerintahan desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur

wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Kewenangan desa adalah:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

2.2. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya penguraian kerangka pemikiran dalam penulisan skripsi ini didasarkan kepada Kepemimpinan Kepala Desa dalam meningkatkan kemampuan masyarakatnya untuk mencapai tertib administrasi.

Untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sudah ditentukan suatu proses kegiatan untuk menggerakkan organisasi, proses kegiatan ini lazim disebut manajemen, yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam organisasi. Kelompok manajemen dalam organisasi tersebut tugasnya adalah menggerakkan orang-orang lain untuk bekerja sedemikian rupa sehingga tujuan yang ditentukan tercapai dengan baik.

Menurut Sarwoto (2005:116):

Suatu hal yang harus difahami adalah pengorganisasian merupakan suatu fungsi manajemen dan administrasi negara. Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokkan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas dan tanggung jawab serta wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang ditentukan.

Selanjutnya dari kutipan di atas dapat pula diteruskan kepada pendapat yang diajukan oleh Atmosoedirjo (2000:80):

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

“Administrasi merupakan suatu sistem yang tertentu, memerlukan input transportasi pengolahan *output* yang tertentu”.

Dari pendapat di atas, dapat diartikan bahwa sistem administrasi itu merupakan suatu proses yang mengarah kepada suatu perhitungan nilai kebijaksanaan yang dapat disebutkan suatu strategi yang diwadahi oleh suatu organisasi. Jadi strategi merupakan perhitungan mengenai rangkaian kebijaksanaan dan langkah-langkah pelaksanaan yang tentu memerlukan metode dan teknik tertentu.

Selanjutnya, Kepala Desa sebagai Kepala Wilayah adalah merupakan penguasa tunggal dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan, dan membina kehidupan masyarakat disegala bidang kehidupan. Oleh karenanya peranan kepala desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan mempunyai tugas yang sangat kompleks. Tugas tersebut haruslah disesuaikan dengan kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan daerah setempat. Secara integral dapat disebutkan bahwa peranan kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintah sangatlah menunjang akan keberhasilan pembangunan.

Salah satu tugas kepala desa tersebut adalah menjalankan administrasi pemerintahan yang melingkupi tertib administrasi kependudukan dan juga bidang-bidang lainnya dalam hal urusan pemerintahan. Apabila suatu sistem administrasi telah tertata dengan baik maka kepala desa akan dapat mengkoordinasikan program-program pembangunan yang akan dijalankan. Dengan kerangka pemikiran yang sedemikian akan dapat ditelaah suatu kajian peranan pemerintah melalui kepala desa dalam hal penerapan kepemimpinannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pencapaian tertib administrasi.

2.3. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan.

Kartono (2000:70) mengatakan tentang hipotesis itu adalah “Hipotesis masih berisikan jawaban bersifat sementara dari suatu kegiatan penelitian, kebenarannya harus diutarakan dari suatu kegiatan melalui riset dan hipotesis itu akan diterima jika faktanya benar”.

Menurut Surakhmad (2000:31), “Hipotesis adalah suatu jawaban, dugaan yang dianggap besar kemungkinan untuk menjadi jawaban yang benar”.

Adapun hipotesis yang diberikan atas permasalahan yang diajukan adalah:

“Jika kepala desa dapat memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat yang dipimpinnya tentang pentingnya tertib administrasi maka masyarakat akan memberikan penilaian positif atas teladan tersebut”.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yakni jenis penelitian yang hanya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai keadaan yang didapatkan pada waktu penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini akan dijabarkan kondisi konkrit dari obyek penelitian, menghubungkan satu variabel atau kondisi dengan variabel atau kondisi lainnya dan selanjutnya akan dihasilkan deskripsi tentang obyek penelitian.

Adapun data kualitatif dihimpun dengan cara-cara yang melihat proses suatu objek penelitian, data semacam ini lebih melihat kepada proses daripada hasil karena didasarkan pada deskripsi proses dan bukan ada perhitungan matematis. Dimana teknik pengumpulan data meliputi pengamatan observasi, wawancara, studi literature/pustaka, angket dan lain-lain.

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Kepala Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.

Waktu Penelitian dilakukan pada akhir Bulan Januari 2014 sampai dengan Bulan Maret 2014.

3.2. Populasi dan Sampel

“Populasi dapat berupa kumpulan dari setiap obyek penelitian. Pada dasarnya, populasi adalah himpunan semua hal (keseluruhan realitas sosial) yang ingin diketahui”. (Erickson dan Nosamchuk, 2001:156).

Sehubungan penelitian yang dilakukan²¹ pada dasarnya dilakukan secara deskriptif maka pada penelitian ini populasi yang diajukan berupa semua populasi yang terdapat di Kantor Kepala Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, baik itu Kepala Desa maupun perangkat desanya.

Memandang sekian banyaknya populasi yang diajukan sementara penelitian difokuskan pada kegiatan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan pada tingkat desa maka dalam hal ini sampel yang diajukan adalah kepala desa dan perangkat Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli

Serdang.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Pengamatan (*Observation*), yaitu pengamatan atas kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam pencapaian tertib administrasi desa.
2. Wawancara, yaitu suatu bentuk tanya jawab kepada responden yang dijadikan objek penelitian dalam hal kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam pencapaian tertib administrasi desa.
3. Studi dokumentasi, mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang relevan untuk mendukung data penelitian yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.

3.4. Definisi Operasional Variabel

Menurut Arikunto (2002:91), variabel adalah “ objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian”.

Dalam penelitian ini hanya ditentukan variabel bebas.

Variabel bebas adalah sejumlah gejala atau faktor atau unsur yang menentukan atau yang mempengaruhi ada atau munculnya gejala atau faktor atau unsur lain yang pada gilirannya gejala atau faktor atau unsur yang kedua disebut variabel terikat.

Variabel terikat adalah sejumlah gejala atau faktor atau unsur yang ada atau muncul dipengaruhi atau ditentukan oleh adanya variabel bebas. (Nawawi, 2007:57).

Pada penulisan skripsi ini nantinya penulis akan mengemukakan dua variabel yang sangat menentukan dan saling berhubungan. Kedua variabel dimaksud adalah :

1. Variabel bebas (*Independent Variable*) atau disebut juga variabel yang diselidiki pengaruhnya yang dalam hal ini adalah “Kepemimpinan“ dengan indikatornya :

- a. Memimpin pemerintahan
 - b. Mengkoordinasikan pembangunan
 - c. Membina kehidupan masyarakat.
2. Variabel Terikat (dependent variable) yang dalam pembahasan skripsi ini adalah “Kemampuan Masyarakat“, dengan indikatornya :
- a. Pelaksanaan Pembangunan
 - b. Kerjasama dengan pemerintahan

Definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian, seorang peneliti akan mengetahui baik buruknya pengukuran tersebut :

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memimpin pemerintahan.
Dalam hal ini adalah peranan kepala desa untuk membina ketenteraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan ketenteraman dan ketertibvan yang diterapkan oleh pemerintah.
2. Mengkoordinasikan pembangunan.
Dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan daerah maka perlu dilaksanakan tugas pokok pembangunan daerah di bidang pembinaan sarana desa, peningkatan daerah minus serta pembinaan lingkungan tata pemukiman.
3. Membina kehidupan masyarakat.
Dalam hal ini adalah melaksanakan tugas kantor pemerintahan Desa itu sendiri.
4. Pelaksanaan Pembangunan
Adalah aktivitas yang dijalankan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
5. Kerjasama dengan pemerintahan
Merupakan suatu bentuk kerjasama yang diberikan masyarakat agar terlaksananya pemerintahan.

3.5. Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif . Metode penelitian deskriptif ini adalah tipe penelitian yang digunakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

untuk menggambarkan kondisi data, serta gejala – gejala yang ada.

Menurut Rakhmat (2005:35):

Metode deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan koneksi dan data serta gejala-gejala yang ada. Metode deskriptif bertujuan untuk :

1. Mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang melukiskan gejala yang ada.
2. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek yang berlaku.
3. Membuat perbandingan dan evaluasi.
4. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

Metode analisis data ini berpedoman pada wawancara yang dilakukan sewaktu penelitian dilakukan. Temuan dari suatu wawancara yang dilakukan oleh penulis tersebut akan diperbandingkan dengan apa yang telah diteorikan kemudian dicari kesimpulannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Dalam rangka meningkatkan kemampuan perangkat desa untuk tercapainya tertib administrasi desa, Kepala desa harus berupaya dalam meningkatkan kemampuan perangkat desa dengan jalan mengikuti sertakan dalam kursus-kursus, penataran-penataran serta memberikan motivasi terhadap perangkatnya.
2. Kepala Desa dalam menjalankan fungsi koordinasinya terhadap semua pelaksanaan pembangunan di wilayahnya, selalu mengadakan kunjungan, tatap muka dengan pemuka masyarakat di samping juga mengadakan pertemuan-pertemuannya dengan pemuka-pemuka masyarakat yang ada di wilayah kerjanya.
3. Motivasi, kesadaran dan disiplin perangkat desa dalam melaksanakan tugas yang diperoleh dari kepala desa serta pengamatan selama penelitian masih kurang, sehingga kelancaran dalam penyelenggaraan administrasi kurang tertib.
4. Sarana dan prasarana untuk kelancaran tertib administrasi belum memadai yang dapat menunjang untuk kelancaran penyelenggaraan tertib administrasi.
5. Dalam upaya meningkatkan kemampuan perangkat desa untuk tercapainya tertib administrasi desa, kepala desa mempergunakan tipe kepemimpinan demokratis.

5.2. Saran

1. Kepala desa sebagai kepala wilayah dapat berfungsi secara efektif dan efisien jika hambatan-hambatan dapat diatasi dengan sebaik-baiknya, untuk itu sudah saatnya pemerintahan pusat mempertegas kembali tentang sejauh mana sebenarnya kedudukan Kepala Desa sebagai administrator pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan.

2. Dalam melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa khususnya dalam hal pelayanan terhadap masyarakat hendaknya Kepala Desa sebagai kepala wilayah lebih meningkatkan koordinasi lagi dengan instansi vertikal yang ada di wilayahnya sehingga dengan demikian setiap masalah yang penanganannya berkaitan dengan unit organisasi lain dapat dikonfirmasi secara integral.
3. Dan perlu diperhatikan struktur sosial ekonomi masyarakat, nilai-nilai dan norma-norma yang ada dan berkembang di masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Alex Nitisemito, *Manajemen Personalia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- American Management Association, *Kepemimpinan Dalam Perusahaan*, terjemahan Wijadi M.A. Bharata, Jakarta, 2004.
- B.H. Erickson dan TA. Nosamchuk, *Memahami Data Statistik Untuk Ilmu Sosial*, LP3ES, Jakarta, 2001.
- H.R. Danan Djaya, *Peranan Humas Dalam Perusahaan*, Alumni, Bandung, 2005.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, PT. remadja Karya, Bandung, 2005.
- Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, CV. Rajawali, Jakarta, 2003.
- _____, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Alumni, Bandung, 2000.
- Komaruddin, *Pengantar Ilmu Administrasi*, Alumni, Bandung, 2008.
- M. Sinungan, *Produktivitas Apa dan Bagaimana*, PT. Persada, Jakarta, 2001.
- Moh. Agus Tulus, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Mohammad Hatta, *Pengantar Ke Jalan Ilmu Pengetahuan*, Mutiara, Jakarta, 2000.
- S. Prajudi Atmosoedirjo, *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Suhardi, *Politik Sosial Modern, Dasar dan Directiva*, Yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta, 2003.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 2000.